

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Tujuan dari otonomi tersebut diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan. Pelaksanaannya pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah secara efektif dan efisien.

Faktor penentu berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah ialah keuangan. Hal ini membuat keuangan menjadi salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Pengelolaan keuangan daerah sendiri dirumuskan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, penerapan prinsip *good governance* bagi pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

APBD merupakan salah satu indikator yang penting dalam memenuhi otonomi daerah. Komponen APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah menurut jenisnya terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran Belanja digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Belanja Menurut jenis atau klasifikasi ekonomi terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, ditambah transfer. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban daerahnya secara berkala agar menjadi bahan penilaian apakah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya. Laporan pertanggung jawaban ini disusun sesuai aturan yang

berlaku. Laporan pertanggung jawaban ini adalah Laporan keuangan pemerintah daerah. Manfaat dari Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi dan sebagai media untuk memprediksi kesehatan keuangan pemerintah serta dapat memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan dengan baik dikarenakan latar belakang pembaca laporan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu ketidakmampuan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisa laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan tahapan dan metoda tertentu. Tahapan-tahapan analisis laporan keuangan merupakan urutan-urutan langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan metode analisis merupakan berbagai teknik atau cara menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan memiliki beberapa teknik analisis, diantaranya analisis varian, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi.

Analisis laporan keuangan dilakukan atas kelompok akun pada masing-masing laporan keuangan pemerintah. Dengan kata lain, analisis laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan terhadap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun belanja dan beban. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap salah satu jenis pendapatan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, yaitu pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sendiri bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan sebuah indikasi penting agar

suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tidak mengandalkan dana transfer pusat. Karena apabila Pendapatan Asli Daerahnya kecil maka akan bergantung terhadap dana transfer pusat. Provinsi Sumatera Selatan masih masuk menduduki ke posisi 10 besar Provinsi dengan PAD tertinggi pada tahun anggaran 2021, yaitu menempati peringkat 9. Oleh karena itu Provinsi Sumsel harus tetap membuat PAD mencapai target atau meningkat.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	3,165,360,996,225.00	3,031,633,624,303.95	95.78
2018	3,449,590,628,837.00	3,528,010,712,183.54	102.27
2019	3,436,828,903,746.55	3,494,510,853,251.62	101.68
2020	3,617,058,256,621.75	3,375,100,984,842.03	93.31
2021	4,747,088,053,456.97	3,866,149,015,117.47	81.44

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah*

Berdasarkan data yang diuraikan di Tabel 1.1 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 semakin menurun. Dapat dilihat pada tahun 2019 realisasinya mencapai 101.68 % bahkan melebihi target yang sudah ditentukan. Realisasi anggaran yang didapat 3.494.510.853.251,62. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 93.31% dari target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Realisasi anggaran yang didapat menurun menjadi 3.375.100.984.842,03. Tahun 2021 makin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya realisasi hanya mencapai 81.44% dari target yang sudah ditentukan tetapi realisasi yang didapat melebihi jumlah realisasi di tahun sebelumnya yaitu 3.866.149.015.117,47.

Dari laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terlihat bahwa presentase dan realisasi Pendapatan Asli Daerah naik turun. Hal ini mendorong peneliti tertarik untuk menilai kinerja keuangan dalam Pendapatan Asli Daerah. Kinerja keuangan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah di tahun-tahun

selanjutnya. Pengukuran Kinerja dilakukan menggunakan beberapa Teknik Analisis Laporan Keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis selisih (*variance*)?
2. Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis pertumbuhan?
3. Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis Rasio Keuangan yang terdiri dari Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada. Peneliti membatasi ruang lingkup pada penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode analisis pendapatan yaitu analisis selisih (*variance*), analisis pertumbuhan, dan analisis rasio keuangan yang mencakup derajat desentralisasi, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD. Serta menganalisis perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun dari tahun ke tahun. Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta komponen-komponennya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2019-2021. Penelitian ini dilakukan di Badan pendapatan Daerah provinsi Sumatera Selatan (BAPENDA) yang berlokasi di Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Telepon: (0711) 319819 Kode Pos 30137 E-mail: [pdf@dispendaprovsumsel.co.cc](mailto:pdf@dispendaprovsumsel.co.cc).

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis selisih (*variance*).
2. Untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis pertumbuhan.
3. Untuk mengetahui Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator analisis Rasio Keuangan yaitu analisis derajat desentralisasi, tingkat Efektivitas PAD, Tingkat Efektivitas Pajak daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran tentang Analisis pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021. Serta diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dibidang studi analisis Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Analisis PAD di Provinsi Sumatera Selatan.